

TAJUK RENCANA

Pahlawan di Tahun Politik

Peringatan Hari Pahlawan tahun 2018 berlangsung di tengah kontestasi politik jelang pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019.

Tema itu sengaja kita angkat agar elite yang berkontestasi, Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan tim sukses mereka tetap mau mengingat jasa-jasa para pahlawan. Para pahlawan bangsa itu telah memerdekakan Indonesia dan mempersatukan Indonesia dari cengkraman kolonial Belanda. Karena perjuangan para pahlawan itulah, Indonesia bisa menggapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Dalam naskah Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, "Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Kemerdekaan memang telah diraih, persatuan telah diucapkan, kedaulatan rakyat telah digenggam, tetapi masyarakat adil dan makmur masih harus diperjuangkan.

Masyarakat yang adil dan makmur itulah yang harus terus diperjuangkan. Namun, kita juga mau mengingatkan agar kontestasi politik jangan sampai merobek persatuan bangsa, jangan sampai merobek persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Upaya untuk merobek persatuan dan merusak tenun kemajemukan adalah pengkhianatan terhadap pengorbanan para pahlawan.

Kita menangkan adanya gejala untuk mempertajam polarisasi masyarakat terjadi dalam kampanye yang mutunya rendah. Media sosial berperan besar kian mempertajam kelompok-kelompok di masyarakat. Situasi seperti itu kian diperparah ketika kebenaran ditentukan berdasarkan keyakinan atau preferensi pilihan, bukan berdasarkan akal sehat.

Dalam situasi psikologi politik itu, kita mengingatkan elite politik lebih bijak berkata-kata, lebih bijak pula mengumbar fakta demi dan untuk terjaganya persatuan bangsa. Pemimpin adalah manusia biasa yang punya kekuatan dan kelemahan. Beda pilihan biasa dan tidak harus merusak tenun persaudaraan.

Kita justru mau mendorong agar kandidat presiden, dalam kontestasi politik 2019, menawarkan program untuk mengisi kemerdekaan, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang makmur dan masyarakat yang adil masalah jauh dari harapan. Orang miskin masih ada. Kesenjangan sosial ekonomi masih terbuka. Kesenjangan geografis antara Jawa dan luar Jawa masih juga menganga. Keadilan hukum hanya manis dalam kata-kata, tetapi miskin dalam realitas.

Pekerjaan rumah mengisi kemerdekaan inilah yang harus ditawarkan kedua kandidat presiden dalam program kampanye. Masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan pendiri bangsa dan menjadi tujuan negara. Perdebatan kampanye seharusnya dimuaraikan pada terminal akhir bernegara, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Kita dorong kandidat pemimpin untuk berbicara soal program itu, bukan hanya ungkapan yang mengaduk-aduk emosi massa.

Australia Hadapi Situasi Kompleks

Tidak ada yang abadi selain perubahan. Ungkapan yang mungkin terdengar klise ini sangat pas menggambarkan apa yang dihadapi Australia sekarang.

Lebih dari enam dekade sejak berakhirnya Perang Dunia II, Australia menikmati kondisi Pasifik yang tenang, aman. Tidak ada situasi yang dapat berpotensi mengancam mereka. Negara-negara di Pasifik adalah mitra yang baik bagi Australia dan tak ada kekuatan besar yang hadir di kawasan itu sebagai ancaman.

Selain Australia, pemain besar di Pasifik dalam periode itu ialah Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Perancis. Bagi Canberra, mereka merupakan mitra dan sekutu yang cukup dekat.

Akan tetapi, seperti ditulis situs ABC, pada 2006, Beijing mulai masuk ke Pasifik. China mengembangkan diplomasi pemberian bantuan pembangunan bagi negara-negara Pasifik yang dinilai sejumlah kalangan bertujuan membuat mereka mengakui Beijing ketimbang Taipei. Sejak itu, dari semula merupakan kawasan "tenang" yang didominasi Australia bersama sekutunya, Pasifik menjadi wilayah yang mengikhti dinamika global. Kemunculan China sebagai kekuatan baru global tecermin di Pasifik.

Beredar kabar beberapa waktu lalu, China hendak membangun pangkalan di Vanuatu, negara berpenduduk 283.000 di Pasifik. Beijing menyebut berita itu sebagai kabar bohong (*false news*). Bantuan juga diberikan Vanuatu. Tidak ada kelanjutan kabar tersebut. Namun, berita ini mendapat perhatian luas dan mengingatkan betapa kondisi berubah drastis jika ada kekuatan non-sekutu Australia memiliki pangkalan di Pasifik. Situasi agak memanas saat muncul tuduhan China berusaha mengintervensi politik dalam negeri Australia. Selain itu, muncul pula pernyataan, perusahaan teknologi dan komunikasi China sebaiknya tidak ikut dalam proyek strategis jaringan telekomunikasi.

Akan tetapi, dalam situasi yang berubah ini, Australia harus bijaksana. China yang tumbuh besar merupakan mitra dagang penting. Komisi Investasi dan Perdagangan Australia menyebutkan, tahun lalu, nilai perdagangan Australia dengan China mencapai 133 miliar dollar AS, naik lebih dari 16 persen ketimbang 2016. Angka itu menyumbang 24 persen dari total perdagangan Australia. China sekaligus mitra perdagangan dua arah (pasar ekspor dan sumber impor) terbesar bagi Australia.

Media China, *Global Times*, melalui situsnya, menyebutkan, perekonomian China dan Australia saling melengkapi. Namun, diingatkan pula oleh media itu, jika hubungan bilateral kedua negara dinilai dalam perspektif ideologi dan hegemoni Barat, perselisihan yang tidak perlu akan menghambat relasi mereka.

Dalam konteks yang kompleks inilah Australia bersikap. Seperti diberitakan harian ini, Jumat lalu, PM Scott Morrison mengumumkan bantuan infrastruktur bagi negara-negara Pasifik. Berbagai kalangan memaklumi, bantuan bertujuan memastikan kehadiran Australia di negara-negara Pasifik yang selama ini diinjeksi dana China. Namun, Australia juga tidak ingin bermusuhan dengan China karena pada saat yang sama, Canberra memberi sinyal persahabatan lewat pertemuan Menlu Australia Marise Payne dengan Menlu China Wang Yi di Beijing.

KOMPAS

TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum:

Jakob Oetama

Wakil Pemimpin Umum:

Lilik Oetama, Rikard Bagun

Pemimpin Redaksi/Peranggung Jawab:

Budiman Tanudjaja

Wakil Pemimpin Redaksi:

Nurik Mardiana Parbuty

Redaktur Senior:

Ninok Leksoro

Redaktur Pelaksana:

Mohammad Bakir

Wakil Redaktur Pelaksana:

Try Harjono, P. Tri Agung Kristanto

Sub Redaktur Pelaksana:

Sultha Dhamasaputra, Adi Prasetyo

Secretaris Redaksi:

Subut Tjahjono, Ilham Khoiri

Pahlawan Milenial

Fajar Riza Ul Haq
Pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah

minkan pantulan dari kecenderungan sosial-politis selepas kepergian para pahlawan.

Ketakpedulian dan buta sejarah

Mari kita tengok kesadaran sejarah milineal di "Negeri Paman Sam" sebagai perbandingannya. Lembaga Victims of Communism and Memorial Fund (2017) menemukan satu dari lima orang milineal dengan rentang usia 21-29 tahun di Amerika (23 persen) menganggap Joseph Stalin, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un sebagai pahlawan. Hampir separuhnya (44 persen) menggandrungi sosialisme dan komunisme. Namun, mereka tidak mengetahui konsepsi dan implikasi dari kedua sistem politik itu. Anomali ini disebabkan faktor ketidakpedulian (*ignorance*) dan kebutaan sejarah (*history illiteracy*). Kita bisa melihat, tingkat pendidikan tidak berkorelasi positif dengan tingkat literasi.

Becermin pada fenomena Amerika, kita patut memikirkan langkah-langkah bersama agar generasi muda Indonesia tidak diringkus oleh rasa ketidakpedulian sehingga mengalami kebutaan sejarah. Yang melegakan, sebagian besar kaum milineal Indonesia masih melihat para pejuang kemerdekaan sebagai sosok pahlawannya (49,3 persen). Imajinasi pejuang kemerdekaan sebagai pahlawan masih tertanam kuat meskipun ada pergeseran pemahaman atas nilai-nilai kepahlawanan. Tokoh-tokoh populer juga menjadi panutan (33,6 persen), di samping tokoh agama (9,6 persen) dan tokoh imajiner produksi industri (3,5 persen). Kurang dikenalnya nama-nama pahlawan nasional, termasuk teladan patriotismenya, perlu dicariarakan terobosan dalam metode pembelajaran di lembaga pendidikan.

Menguatnya orientasi kesejahteraan rakyat dan pembelajaran terhadap kebenaran dalam bingkai kepahlawanan mengisyaratkan kepedulian milenial terhadap persoalan mendasar hari ini. Semangatnya adalah mereka lebihutamakan hajat publik atas dasar prinsip keadilan yang mampu merekatkan solidaritas kebangsaan. Tantangan ketimpangan ekonomi dan ketidakpastian hukum membutuhkan aksi bersama berlandaskan semangat cinta Tanah Air. Kita tidak boleh membiarkan benih-benih sektarianisme golongan, fasisme kelompok, dan ekstremisme politik-keagamaan bersemi atas membela keadilan.

Dengan berkaca pada keberanian para pemuda Surabaya menurunkan dan merobek bendera Belanda di Hotel Yamato, 73 tahun silam, tanggung jawab generasi sekarang adalah menjaga kedaulatan Merah Putih serta berjuang menegakkannya dan berkibar setinggi mungkin di panggung dunia. Adalah ironis jika ada elemen bangsa ini yang memungungi kedua-



latan Merah Putih dan mencoba mengoyak ingatan kolektif atas imajinasi Indonesia sebagai bangsa majemuk.

Memori kedekatan Abdurrahman Awad Baswedan dan YB Mangunwijaya seperti diungkap harian ini (9/11/2018) penting terus dihidupkan sehingga menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Sejarah kegigihan perjuangan Mohammad Hatta tak terpisahkan dari perkawannya dengan Arnold Mononutu.

Buya Syafii Maarif (2009) melukiskan persahabatan lintas ideologi itu dengan apik: "Betapa seorang Natsir atau Prawoto Mangkusamito begitu dekat dengan Ignatius Joseph Kasimo, Herman Johannes, Albert Mangaratus Tambunan, atau Johannes Leimena, baik pada masa revolusi kemerdekaan maupun sesudahnya. Atau antara Burhanuddin Harahap dan Ida Anak Agung Gde Agung yang Hindu. Kasimo bahkan bersama tokoh Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) mencoba melawan sistem politik otoritarian Soekarno pada era demokrasi terpimpin (1959-1966)."

Teladan para pejuang kemerdekaan adalah menepikan perbedaan latar belakang agama, ideologi, dan suku demi merubut kedaulatan negara dan mempersatukan bangsa-hangsa di Nusantara di bawah panji Pancasila. Tokoh-tokoh bangsa telah mempraktikkan embrio politik kewargaan tanpa harus melenyapkan identitas politik masing-masing. Ini merupakan warisan berharga.

Muda dan memajukan

Tantangan generasi milenial cukup pelik mengingat ada kecenderungan menguatnya primordialisme kelompok berbasis politik identitas seiring gelombang populisme global. Kita harus mewaspadai upaya-upaya untuk menyeret penyelesaian persoalan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan hukum ke ranah politik identitas dengan mengedepankan sentimen golongan.

Salah satu cara melawan sekaligus mengadang kemungkinan munculnya tirani politik identitas adalah menyegarkan

warisan persahabatan lintas agama dan ideologi dalam ingatan publik. Tanpa jiwa besar dan pengorbanan mereka, kita belum tentu bisa menyaksikan Indonesia merdeka bersendikan kebinekaan, dari Aceh hingga Papua.

Kasman Singodimejo, tokoh Muhammadiyah dan Jaks Agung Indonesia periode 1945 - 1946, dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo karena kontribusi pentingnya dalam merumuskan dasar negara. Ia aktor penting di balik melukainya sikap keras Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Umum Muhammadiyah 1942-1953) yang mempertahankan tujuh kata terkait syariat Islam dalam sila pertama Pancasila, yakni "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Keputusan politik yang mahakrusial ini menandai keberterimaan dan kesediaan golongan Islam dengan kelompok lain dalam bingkai dasar negara. Kearifan bernegara ini tidak hanya penting untuk direkam dalam memori kolektif bangsa, tetapi juga ditransformasikan dalam proses memajukan Indonesia. Adalah sangat menggembirakan ketika generasi milenial menerjemahkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kerangka perjuangan meningkatkan kesejahteraan, memerangi keterbelakangan, dan menegakkan keadilan. Senapas dengan ini, generasi muda yang mendedikasikan diri demi prestasi dan karya-karya yang mengharumkan nama bangsa merupakan pahlawan milenial; muda dan memajukan Indonesia.

Pahlawan Demokrasi Era Milenial

Angga Indraswara

Dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

"Everything else exists so that this one thing might be: the eternal miracle of infinite love."

(Karl Rahner, SJ)

Sebuah bangsa tak dapat hidup tanpa sosok pahlawan. Perjuangan mereka adalah yang melahirkan sebuah bangsa dan kisah tentang mereka jugalah yang membentuk imajinasi kolektif yang mempersatukan bangsa itu.

Negeri ini tak abai soal itu. Selama berpuh-puluh tahun imajinasi kolektif tentang para pahlawannya dirawat melalui berbagai cara. Pelbagai kisah kepahlawanan dituangkan ke dalam buku-buku sejarah agar generasi muda tak melupakan mereka.

Namun, derap sejarah kerap membawa kejutan. Meskipun dalam pendidikan formal generasi muda zaman ini juga menerima pelajaran tentang para pahlawan kemerdekaan Indonesia, rupanya mereka membangun imajinasi kolektif yang sama sekali lain.

Dalam survei yang diadakan oleh Litbang Kompas (31 Oktober-1 November 2018), generasi milenial di Indonesia rupanya tidak lagi mengidentifikasi sosok pahlawan dengan para pejuang kemerdekaan. Bagi sebagian besar dari mereka (51,8 persen), sosok pahlawan adalah orang-orang yang gigih memperjuangkan kesejahteraan banyak orang.

Selain itu, 39,5 persen menyebut para pahlawan adalah pembela kebenaran. Hanya 4,6 persen yang menyatakan bahwa para pahlawan adalah pembela kemerdekaan Indonesia.

Temuan menarik ini bisa menjadi titik tolak untuk memikirkan lebih jauh sebuah pertanyaan sederhana: menjelang Pemilu 2019, sosok seperti apakah yang bisa disebut sebagai pahlawan negeri ini? Jawaban atas pertanyaan ini

tentu menuntut pemahaman mengenai apa yang paling berharga dari demokrasi.

Demokrasi: lebih dari sekadar prosedur

Demokrasi berarti pelaksanaan pemilu. Itulah yang ada dalam benak cukup banyak orang ketika berbicara soal demokrasi.

Pemahaman simplistik ini adalah buah dari lintasan sejarah. Setelah lama tenggelam sejak kelahirannya di Athena pada sekitar abad kelima SM, demokrasi kembali muncul di cakrawala politik dunia pada abad ke-18. Yang memicu kelahirannya kembali adalah dua revolusi besar di kedua sisi Samudra Atlantik.

Akan tetapi, karena wilayah Amerika Utara dan Perancis jauh lebih luas daripada Athena, demokrasi lahir kembali dengan bentuk yang berbeda dari pendahulunya. Apabila di Athena setiap warga kota (hanya laki-laki merdeka) terlibat langsung dalam proses deliberasi dan pengambilan keputusan mengenai tata aturan hidup bersama serta secara bergantian melaksanakan tugas pemerintahan, di Amerika Serikat dan Perancis, warga negara memilih wakil-wakilnya untuk melaksanakan peran itu. Oleh Alexander Hamilton, sistem ini disebut demokrasi representatif (*representative democracy*).

Sejak saat itu, demokrasi representatif pelan-pelan menyebar ke berbagai belahan dunia. Dengan kejatuhan Uni Soviet, lawan terakhirnya pun tumbang. Demokrasi representatif tampil sebagai pemenang dan kini dipandang sebagai sistem pemerintahan *par excellence*. Menolak sistem ini sama saja berpamitan dari panggung politik.

Kemenangan demokrasi representatif ini membuat orang

tak lagi bertanya mengenai kebaikan dan keburukan sistem ini. Yang ada hanyalah pesta perayaan pemilu. Itulah mengapa setiap kali pemilu diadakan, negara lalu menjadi gaduh. Jalan-jalan ribut dengan kampanye, media massa penuh dengan opini ahli, dan media sosial dijejali dengan komentar para netizen.

Pemilu lalu menjadi pusat dari demokrasi seolah-olah pelaksanaan prosedur ini dengan sendirinya dapat menjamin bahwa penggunaan kekuasaan akan menjadi lebih bertanggung jawab. Padahal, dalam praktiknya tidak ada jaminan bahwa setelah pemilu selesai dan pemerintah baru terbentuk, para politisi akan mengedepankan kepentingan pemilihnya.

Persis, inilah sisi gelap dari demokrasi representatif yang diungkap oleh John Dunn dalam *The Story of Democracy*. Pada akhirnya, demokrasi representatif tetap tidak menjadikan warga negara sebagai pemilih memiliki kuasa atas aturan dan kebijakan yang menentukan jauh-bangun kesejahteraan hidupnya sehari-hari. Jika terus berlanjut seperti ini, demokrasi representatif dan pemilu tidak lebih dari sekadar alat pelegitimasi kekuasaan politis.

Pengawal demokratisasi

Situasi seperti inilah yang tampaknya membuat bangsa ini merindukan pahlawan demokrasi di era milenial. Sebagaimana diungkapkan dengan cerdas oleh generasi milenial, tugas pahlawan pada zaman ini bukan lagi membela kemerdekaan Indonesia. Tugas mereka adalah membela kesejahteraan orang banyak dan membela kebenaran. Jika mau dirumuskan secara lebih lugas, ini berarti tugas para pahlawan era milenial adalah menjadi pengawal demokratisasi.

Demokratisasi menunjuk pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pelaksanaan pemilu. Demokratisasi adalah proses penanaman nilai dasar demokrasi ke dalam setiap ruang kehidupan. Dengan dikatakan lain, demokratisasi tidak berhenti pada perkara pembentukan institusi yang memungkinkan pemilu bisa berlangsung. Lebih dari itu, demokratisasi terarah pada perubahan kultural yang memungkinkan tumbuhnya nilai-nilai yang menjadikan demokrasi begitu berharga.

Nilai itu bertopang pada gagasan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam pembentukan tata hidup bersama dan penggunaan kekuasaan yang ada di masyarakat. Di balik gagasan itu tentu saja adalah keyakinan bahwa setiap manusia dilahirkan setara dan karena itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kehidupannya.

Pokok yang terakhir ini memiliki implikasi penting. Karena yang dituju adalah pembelajaran martabat setiap warga negara, demokratisasi perlu diperlihatkan fakta bahwa tidak setiap warga negara cukup berdaya untuk melaksanakan hak-hak politiknya. Ada yang memang sudah berdaya, tetapi tidak sedikit pula yang terpinggirkan karena kepentingannya tidak terwakili dalam kontestasi pemilu. Mereka inilah bagian dari negeri ini yang memerlukan pembelaan oleh para pahlawan demokrasi era milenial.

Maka, pahlawan demokrasi era milenial tidak akan hanya sibuk berkampanye bagi politisi yang paling luhai menampilkan diri sebagai pembela rakyat lalu sesudah itu duduk tenang. Justru sebaliknya: sesudah pesta usai, ia akan berdiri paling depan menjadi pengawal demokratisasi. Dengan gigih, ia akan memperjuangkan aneka tindakan

afirmatif untuk mengangkat kehidupan minoritas dan kelompok tak berdaya di negeri ini. Betapa negeri ini merindukan pahlawan demokrasi era milenial!

POJOK

Caleg memanfaatkan data medsos. Followers pun bisa beli.

Awasi kegiatan politisi pengusaha. Memolitikkan bisnis, membisniskan politik.

Pelibatan TNI tangani teroris butuh landasan hukum. Bukan hukum rimba.

Mang Ucil